

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015

Angga Natalia¹

Abstrak

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan banyak yang tidak lolos verifikasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada dipertanyakannya nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dan kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa.

Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Rekrutmen, Demokrasi

Pendahuluan

Pilkada serentak wajib diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 hingga Juni 2016. Pilkada serentak gelombang pertama di Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) provinsi dan

¹ beliau adalah staf pengajar di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

260 (Dua Ratus Enam Puluh) kabupaten/kota. Artinya, sekitar 50% dari total 537¹ jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama.

Pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun ini merupakan terobosan politik penting dalam perkembangan demokrasi. Ini merupakan bagian dari penataan sistem politik yang terus berkembang sejak era reformasi, yang menempatkan daerah sebagai entitas otonom dan mandiri. Sejak digelar pada pertengahan tahun 2005 hingga sekarang, pilkada di Indonesia telah memperkuat basis legitimasi kepemimpinan politik lokal yang demokratis. Bagaimanapun fenomena pilkada, telah menjadi potret praktik demokrasi politik, di samping pileg dan pilpres. Partai politik memiliki posisi penting dalam pencalonan kandidat pemimpin daerah, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan ataupun independen. Walaupun demikian, sebagian besar kandidat maju melalui jalur parpol, baik diajukan partai pengusung sendiri maupun koalisi. Oleh sebab itu, penting mencermati perkembangan parpol dewasa ini.

Pada proses pelaksanaannya banyak dampak yang akan ditimbulkan dari pilkada serentak ini, baik dampak positif maupun negatif. Selama ini, pilkada yang tidak serentak dari sisi penganggaran dinilai tidak efisien dan boros termasuk dalam penggunaan sumber daya manusia. Selain itu dari sisi politik, Pilkada yang tidak serentak juga memiliki kecenderungan terjadinya kecurangan melalui mobilisasi massa antardaerah. Sedangkan dengan diadakan pilkada serentak dinilai lebih efektif dan menghemat biaya anggarannya. Pilkada serentak bermanfaat mengurangi kecurangan melalui mobilisasi massa dari daerah lain dan migrasi kekuatan para cukong yang ingin bermain dalam pilkada. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada tak serentak adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan. Melalui pilkada serentak inilah secara teoritis berupaya untuk mencegah hal-hal negatif tersebut.

¹ <http://news.liputan6.com/>, diakses 10 Agustus 2015.

Namun demikian, di balik manfaat pilkada serentak juga terdapat potensi kekhawatiran bila penyelenggaraannya dinilai tidak demokratis. Pilkada serentak rawan dengan konflik serentak. Contoh yang terjadi saat pilkada 2015 ini adalah perihal munculnya kandidat tunggal pada tujuh daerah yaitu Kota Mataram (Provinsi NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kota Surabaya, dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur).² Tentu konflik serentak tersebut memiliki dampak yang lebih besar. Pada daerah yang telah memiliki dua atau tiga calon kandidat kepala daerah pun masih berpeluang munculnya kandidat tunggal karena proses verifikasi belum selesai. Untuk itu penyelenggaraan pilkada serentak juga perlu dipastikan dengan aturan main dan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan konflik yang skalanya lebih masif. Konflik Parpol Partai politik saat ini juga memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan pilkada tersebut, sesuai dengan fungsi partai politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan umum, baik di legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah

² <http://sp.beritasatu.com/nasional/kenapa-parpol-dan-kandidat-kepala-daerah-takut-pada-petahana>, diakses 10 Agustus 2015.

Angga Natalia: **PERAN PARTAI POLITIK DALAM**

kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Peran partai politik tampak dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU diatur, partai politik maupun gabungan partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerah bila memiliki 20 persen kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah perolehan dalam pemilu legialastif DPRD 2014. Artinya bila partai politik tersebut memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen, dapat mengajukan sendiri. Namun bila tidak, maka harus bergabung dengan partai lainnya agar memenuhi jumlah kursi 20 persen atau 25 persen suara untuk dapat mengajukan bakal calon kepala daerah. Untuk mengajukan nama bakal calon tersebut, tentunya partai politik harus memiliki kepengurusan yang sah.³

Secara umum sistem kepartaian di Indonesia tak dapat dilepaskan dari eksistensi kepengurusan di pusat. Solid tidaknya kepengurusan pusat parpol dapat berpengaruh pada pilkada. Bila rezim pilkada serentak identik dengan pemilu nasional, eksistensi dan peran maka kepengurusan parpol dari pusat sangat menentukan. Dalam kaitan inilah, kita melihat hubungan tidak langsung antara kedewasaan parpol dalam memperkuat soliditas dan kelembagaannya. Karena itulah, realitas konflik di parpol, merupakan tantangan, tidak saja bagi masa depan parpol itu, tetapi juga dalam konteks masa depan kepemimpinan lokal.

Beberapa partai pun sekarang ada yang mengalami konflik kepengurusan. Hal inilah yang tengah dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. PPP dilanda konflik kepengurusan, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda keabsahan kepengurusan PPP Muktamar Surabaya yang dipimpin M. Romahurmuziy. PTUN memenangkan gugatan mantan Ketua Umum PPP SDA dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Kini kasusnya tengah diajukan banding ke

³ <http://m.monitorday.com/>, diakses 10 Agustus 2015.

Pengadilan Tinggi TUN. Sementara di Partai Golkar, Pengadilan Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan sela untuk membekukan sementara Kepengurusan Munas Jakarta Agung Laksono, dan memenangkan gugatan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie. Kini kedua pihak tengah sidang dalam perkara dualisme kepengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sengketa internal partai politik tersebut berpotensi besar menyeret pilkada dalam konflik yang berlarut-larut, bila kedua belah pihak bersengketa memaksa ikut serta, sementara tidak ada kepastian hukum pengurus mana yang berhak mengikuti pilkada tersebut. KPU sendiri sebelumnya, berdasarkan undang-undang menyatakan partai politik yang sah adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Seiring dengan perkembangan konflik, konflik parpol tersebut juga didorong oleh persaingan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. DPR yang dikuasai mayoritas KMP, setelah gagal memaksa KPU untuk mengubah peraturan terkait keabsahan pengurus partai politik yang turut dalam pilkada, mengeluarkan jurus revisi UU Partai Politik. DPR melalui Komisi II tengah mengajukan klausul perubahan undang-undang agar pengurus partai politik yang berhak ikut serta dalam pilkada adalah berdasarkan putusan hukum yang keluar sebelum pendaftaran bakal calon pilkada, meskipun belum final dan mengikat. Kawal Pilkada dalam pandangan sejumlah aktivis prodemokrasi, perkembangan konflik partai politik saat ini telah membuat KPU dalam posisi dilematik dan membahayakan penyelenggaraan serta kualitas dari pemilihan kepala daerah secara serentak. Selain itu juga berpotensi terjadinya konflik berlarut-larut di daerah. Hal-hal di atas hanya sebagian permasalahan yang muncul silih berganti dalam tubuh partai politik di Indonesia.

Sistem politik Indonesia menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan

Angga Natalia: **PERAN PARTAI POLITIK DALAM**

Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Elite parpol seyogiannya menyadari bahwa pilkada bukan sekadar terkait dengan kepentingan parpol melainkan juga keterlibatan rakyat dalam sebuah pesta demokrasi. Terlepas menang atau kalah dalam kontestasi itu, semua pihak yang terlibat harus bisa menunjukkan bahwa mereka telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi demokrasi.

Melalui kondisi Partai Politik yang baik, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Namun, konflik internal yang dialami beberapa partai politik mau tidak mau pasti akan mempengaruhi proses pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 9 Desember 2015. Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Pada kenyataan yang terjadi pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini, ada 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu kandidat calon kepala daerah yang mendaftarkan diri di KPU, bahkan ada 80 daerah yang hanya memiliki dua pasang calon yang masih memiliki potensi untuk memiliki calon tunggal bila tidak lolos

verifikasi bahkan yang memiliki tiga pasang calon sekalipun masih mengkhawatirkan. Banyak statement yang muncul terkait masalah tersebut dari parpol yang dianggap tidak dapat menghasilkan kader-kader yang kompeten untuk menjadi kepala daerah bahkan semboyan kalah sebelum berperang juga berlaku karena melihat lawan kandidat yang merupakan *incumbent* dianggap jauh lebih unggul sehingga di rasa percuma jika ingin menjadi lawannya. Perpecahan dalam tubuh parpol juga dianggap menjadi salah satu penyebabnya.

Sejarah Lahirnya Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.⁴

Pada permulaan perkembangannya di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Garamedia, 1985, h. 159-160.

mulanya bersifat elitist dan aristokrasi, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan yang tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham, dan lahirlah partai politik. partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat *patronage party* (partai perlindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai.⁵

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.⁶

⁵ Ibid., h. 160.

⁶ T May.Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, h.87.

Definisi Partai Politik

Partai politik⁷ adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Carl J. Friedrich⁸ mendefinisikan partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

R.H Soltau: “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memiih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (*A group of citizens more or less voting power, aim to control the government and carry out their general policies*).⁹

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties*¹⁰ mengemukakan definisi sebagai berikut: “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk

⁷ Miriam Budiardjo, op.cit., h. 160-161

⁸ Carl J Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham , Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967, h. 419.

⁹ Roger H. Soltau. *An Introduction to Politics*, London: Longmans, Green & Co, 1961, H. 199.

¹⁰ Sigmund Neumann, “*Modern Political Parties*” dalam *Comparative Politics: A Reader*, Edited oleh Harry Eckstein dan David E, Apter, London: The free Press of Glencoe, 1963, h. 352.

menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (*A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*).

Perlu diterangkan bahwa partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.¹¹

Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:¹²

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik merumuskan usulan-usulan atau mengagregasikan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijabatani oleh partai politik. Dan

¹¹ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, h.162.

¹² *Ibid.*, h.163-164.

bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional. Oleh sebab itu partai politi sering disebut sebagai *broker* (perantara) dan alat pendengar, sedangkan warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini di lakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

3. Sebagai Sarana Rekrutment Politik

Dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu : mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Politik Dan Pilkada Langsung

Indonesia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini tanggal 09 Desember 2015 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung secara serentak di 269 daerah di Indonesia. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2015, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara

lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2011. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Dampak Multi Partai Terhadap Pilkada Langsung

Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku. Dan lebih cocok dengan suatu sistem yang dikatakan menganut multipartai, apabila di dalam wilayah Negara tersebut terdapat lebih dari dua partai yang diakui secara konstitusional.

Contoh Negara yang menganut sistem multipartai, antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Belanda dan Prancis. Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Kata kunci dari sistem multipartai tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, lebih dari dua partai politik. Sistem ini dalam pemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu-ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sendiri hingga memaksa untuk berkoalisi.

Semua sistem kepartaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tak terkecuali sistem multi partai. Sistem multi partai merupakan salah satu praktek demokrasi dimana sistem ini muncul karena adanya kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan aspirasi dalam bentuk partai politik.

Angga Natalia: **PERAN PARTAI POLITIK DALAM**

1. Kelebihan Sistem Multi Partai ini adalah:
 - a. Demokrasi berjalan dengan baik
 - b. Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai
 - c. Rakyat bebas bersuara
 - d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya
2. Kekurangan Sistem Multi Partai ini adalah:
 - a. Menimbulkan persaingan tidak sehat
 - b. Paling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
 - c. Dapat menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah.
 - d. Partai-partai politik dalam arti tidak sehat yang melakukan money politic (lobi-lobi) dan memberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Dari sini lah sifat-sifat para pemerintah yang akan korupsi muncul.
 - e. Berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lainnya.
 - f. Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaimana cara mempertahankan kekuasaan.
 - g. Adanya konflik SARA.
 - h. Kekuatan Partai politik satu dengan yang lainnya tidak akan terlalu jauh, sehingga muaranya akan kearah bagi-bagi kekuasaan.
 - i. Pemerintahan akan semakin Gemuk sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partai yang harus diakomodir dan sulit menempatkan orang yang "benar ditempat yang benar".
 - j. Biaya Politik yang sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai-partai. Sebagai contoh ringan dalam pembuatan kartu suara, kalau partainya seperti sekarang ini, kemungkinan kartu suara akan selebar Tabloid dibanding dengan sedikit partai. Dari sisi ini saja sudah diboroskan keuangan Negara yang cukup besar.
 - k. Logika "lingkaran setan", semakin banyak partai semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, akan semakin sulit memilih. Semakin sulit memilih semakin banyak yang tidak memilih. Semakin banyak Golput, semakin mundur arti

sebuah demokrasi. Jadi Semakin Banyak Partai = Semakin Jelek Kualitas Demokrasi nya. Diakui atau tidak logika ini, anda bisa lihat sendiri carut marut partai politik di Indonesia.

1. Banyak Uang yang di investasikan pada hal-hal yang "kurang produktif" bagi masyarakat banyak. Sebagai contoh ringan saja, anda boleh lihat, hitung dan analisa sendiri, berapa rupiah yang dihabiskan hanya untuk membuat sticker, baliho, spanduk, bendera dan iklan politik.¹³

Partai Politik dan Regenerasi Kepemimpinan di Indonesia

Eksistensi partai politik di Indonesia sudah di mulai sejak negeri ini merasakan dampak dari keberadaan politik etis.¹⁴ Saat itu, semua anak bangsa terseret jauh untuk mendefinisikan ulang kontribusinya selain melalui usaha-usaha ekstraparlementarian. Tercatat beberapa bentukan partai politik baru muncul sebagai jelmaan dari perkumpulan-perkumpulan kelompok studi mahasiswa.

Kehadiran partai politik di sisi lain memberikan peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Dalam konteks ini, kemunculan partai-partai tersebut dapat diapresiasi positif karena di masa itu, bangsa ini belum memiliki visi yang jelas. Dalam pencarian format tadi, partai politik begitu kuat pengaruhnya. Kita

¹³ <http://trimuerisandes.blogspot.com/>, diakses 10 Agustus 2015.

¹⁴ Di gagas oleh Conrad Theodore van Deventer, lahir tanggal 29 September 1857 di Dordrecht, Belanda. Setelah memperoleh gelar M.A. dari Universitas Leiden tahun 1859, bersama istrinya bertolak ke Hindia Belanda; mula-mula bekerja sebagai pegawai pengadilan di Ambon, Dilli, Kupang, dan Semarang. Selama di Hindia Belanda ia menjadi tertarik pada kondisi kehidupan pribumi dan menyatakan keprihatinan. Setelah kembali ke negeri Belanda, ia banyak menulis. Salah satu karyanya, "Een Eereschuld" ("Utang Budi"). Karya ini menimbulkan kegemparan di kalangan Orang Belanda. Tahun 1905, ia duduk dalam Staten Generaal (parlemen Belanda), sebagai anggota partai Demokrasi Liberal, dan berkali-kali duduk sebagai anggota majelis rendah maupun tinggi. <https://smartgeneration.wordpress.com>, diakses 10 Agustus 2015.

bisa menikmatinya melalui perdebatan para *founding fathers*. Soekarno, Natsir, Syahrir, Tan Malaka, Hatta dan sederet nama besar lainnya, membangun visi bersama dalam rangka untuk mengembalikan kemandirian dan martabat bangsa.¹⁵

Korelasi antara partai politik dan visi kepemimpinan di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan hingga dekade 1980-an akhir.¹⁶ Setelah masa itu, partai politik seperti anak kecil, hanya mampu mengeluh untuk memperbaiki nasibnya. Harapannya, nanti dapat menjadi telaah komprehensif yang bisa menjelaskan berbagai fenomena-fenomena kontemporer yang ada. Pengamatan yang detail dan evaluasi menyeluruh urgen dilakukan mengingat lambatnya proses peralihan era transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pembangunan Politik dan Peran Partai

Walau istilah pembangunan politik masih tetap kabur, namun pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilakukan untuk merubah keadaan saat ini, sekalipun telah baik, menuju keadaan lain yang diyakini lebih baik lagi. Jadi, berbeda dari *change*, pembangunan berbicara mengenai langkah konkret yang terencana.¹⁷

Sedangkan politik berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik, untuk melaksanakannya tujuan-tujuan itu di tentukan melalui kebijakan publik (*public policy*) yang menyangkut distribusi (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber daya

¹⁵ Agung Baskoro, <https://smartgeneration.wordpress.com>, diakses 10 Agustus 2015.

¹⁶ Perdebatan Agung Baskoro dengan Randi Muchariman, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angk. 2005 dalam menentukan konsep Pelatihan Pemimpin Bangsa BEM KM UGM dan Madrasah Politik Islam Ulul Albab Center Fisipol UGM, 17 Juni 2007, Masjid Kampus UGM. <https://smartgeneration.wordpress.com>, diakses 10 Agustus 2015.

¹⁷ Riswanda Imawan, *Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan*, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 179.

yang ada, pelaksanaannya melalui kekuasaan dan kewenangan yang dapat dipakai secara persuasif maupun koersif (paksaan). Berbagai frase tadi, setidaknya bisa merangkum berbagai definisi yang ada.¹⁸

Konsep pembangunan politik berarti, perubahan konkrit secara terencana di masyarakat melalui proses pengambilan keputusan hingga kebijakan dengan melibatkan sumber daya baik secara persuasif maupun koersif. Sampai pada tahapan ini, partai politik seharusnya mulai proaktif. Karena Parpol menjadi ekspresi publik dalam menentukan dan menyikapi masalah ataupun sebuah perubahan. Bila Parpol hanya menunggu, otomatis publik akan menilai sepihak bahwa sikap tadi menjadi wajah utuh parpol yang bersangkutan. Konstituen yang cerdas tentunya kritis melihat realitas. Apalagi konteks saat ini, masyarakat semakin memahami komitmen Parpol dalam mengakomodasi kepentingannya.

Sebenarnya masalah tersebut berhubungan langsung dengan fungsi Parpol sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen, dan pengatur konflik.¹⁹ Namun fungsi lain yakni partisipasi, pemandu kepentingan, dan kontrol politik²⁰ akan lebih melengkapi, karena Parpol harus dipahami secara luas oleh masyarakat. Keadaan demikian perlu diimplementasikan agar tidak ada kesenjangan antara kelompok elit dan massa. Bila ini tidak segera disikapi, bukan mustahil tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai-partai politik akan menuju titik nadir, yang tentu saja tidak kondusif bagi instusionalisasi kehidupan politik sebagai pilar penunjang bangunan demokrasi.

¹⁸ Miriam Budiarmo, *op.cit.*, h. 8.

¹⁹ *Ibid.*, h. 163

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, h.116.

Realitas Regenerasi Partai Politik Kontemporer

Salah satu fungsi Parpol yang selama ini terabaikan adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik lebih banyak menyoalkan tentang seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang dan sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan khususnya.²¹ Definisi lain mengungkapkan bahwa rekrutmen politik lebih mengarah pada mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan juga mengusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.²² Untuk definisi yang kedua inilah sebenarnya fokus pembahasan.

Partai politik dituntut harus mampu melahirkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.²³

Melihat kondisi ini tentu kita akan bertanya-tanya, bagaimana kapasitas Parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai pencetak pemimpin-pemimpin masa depan? Atau kepentingan elit yang masih mendominasi sehingga menyebabkan terpotongnya siklus regenerasi kepemimpinan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya belum cukup mewakili bila melihat semakin bobroknya mental dan moral para politisi kita.

Sudah menjadi rahasia umum, publik hari ini menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di ranah politik. Bahkan Transparansi Internasional dalam rilis survei terbarunya mengingatkan

²¹ Surbakti, op.cit., h. 118

²² Budiarmo, op.cit., h.164

²³ Cholisin, dkk. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 2007, h. 113.

bahwa Parpol masih menjadi salah satu terkorup di negeri ini.²⁴ Belum ditambah lagi, dengan sikap-sikap non populis lainnya yang sering dipertontonkan oleh wakil rakyat di media massa. Tidur saat sidang, nitip absen, jalan-jalan ke luar negeri, dan berbagai bentuk skandal lainnya.

Sebagai sarana rekrutmen politik masih banyak partai yang elitis dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut membuat panggung politik bangsa di isi oleh wajah-wajah lama, dengan pemikiran-pemikiran lama juga dengan pengalaman-pengalaman yang sama (monoton). Perpolitikan kita dalam hal rekrutmen politik saat ini cenderung merekrut orang-orang terkenal seperti selebritis. Agus Condro di gedung KAUJE mengungkapkan: *“Parpol saat ini sudah seperti perusahaan saja. Tidak lagi memperjuangkan ideologi, namun sekarang sudah mirip becak, ojek, dan taksi. Sebab jika ada kepala daerah yang mau maju lewat parpol maka harus ada syarat uang di depan dulu.”*²⁵

Keadaan ini lebih banyak disebabkan dari mundurnya bentuk pengawasan kaderisasi di sebagian besar Parpol. Alih-alih memperbaiki kualitasnya yang cenderung memakan waktu, partai-partai lebih banyak mengandalkan kader-kader pragmatis untuk mempercepat *image building* dan perolehan suara di *grass root*. Aktor-aktor demikian, hanya memikirkan bagaimana kedudukan dan posisi mereka agar tetap aman dan nyaman.

²⁴ <http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009-transparency-international/>, diakses 10 Agustus 2015.

²⁵ Disorientasi Partai Politik Dan Libido Kekuasaan diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai-politik-dan-libido-kekuasaan/>, diakses 10 Agustus 2015.

Pemimpin Muda Harapan Indonesia

Peluang memperbaiki negeri ini cukup besar saat mencermati dinamika yang mewarnai reformasi dalam satu dekade. Banyak perubahan telah terjadi, namun masyarakat masih menantikan 'perubahan' sesungguhnya hadir. Fase di mana substansi demokrasi tentang kesejahteraan dapat terealisasi utuh. Perjuangan untuk itu tentu membutuhkan waktu, sehingga, memerlukan desain yang cukup konkrit. Selain itu, aktor yang menjalankan desain menjadi vital agar kita tidak mengulang sejarah di masa lalu. Aktor yang dimaksud tentu memiliki kriteria yang 'lebih sempurna', agar roda perubahan mampu terakselerasi dan terealisasi. Ketika melihat sejarah dan realitas hari ini, maka dengan cukup bangga ia mencatat lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, sedangkan realitas, sudah seharusnya bicara guna melahirkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia berikutnya.

Rakyat sudah jenuh mendengar janji. Mereka butuh bukti agar terinspirasi. Dan diharapkan ikut bergerak bersama menyongsong regenerasi kepemimpinan nasional. Sewajarnya Parpol mempersiapkan langkah-langkah tersebut secara strategis untuk menjawab persoalan kepemimpinan secara aktif sekaligus mendorong upaya lahirnyanya pemimpin-pemimpin muda.

Seorang figur yang mampu bertindak progresif, sensitif, aspiratif, dan solutif dalam menyikapi permasalahan. Tidak lagi terjebak dalam dikotomi usia maupun pengalaman semata. Ia tuntas dengan itu karena senantiasa didewasakan oleh amanah dan masalah yang selalu hadir dalam setiap kontribusinya. Modal demikian setidaknya bisa membangkitkan harapan bahwa bangsa ini masih memiliki masa depan.

Bicara regenerasi kepemimpinan nasional memang mutlak bukan menjadi tanggung jawab partai politik. Akan tetapi, secara efektif advokasi yang dilakukannya dapat mendorong perubahan yang diinginkan. Sama halnya dengan kuota 30% bagi perempuan, perlu *affirmative action* untuk memberikan peran dan tanggung jawab lebih kepada pemuda demi mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Idealnya pembenahan terkait parpol idealnya muncul dari dalam. Agar lebih substansial dan mampu memberi efek lanjutan bagi yang lainnya. Namun, bila di sisi ini, keadaan belum berlangsung, akhirnya harapan memang mesti tetap disebarkan ke ranah lain. Karena harus diakui, bahwa Parpol hanya salah satu, bukan satu-satunya wadah kaderisasi kepemimpinan nasional. Militer, Swasta, Ormas Keagamaan, kampus, dan bentukan lainnya, juga alternatif yang secara rutin menelurkan generasi-generasi terbaiknya.

Terakhir, seideal apapun dorongan yang terjadi demi perbaikan Parpol, pembinaan dan pedampingan di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat akhirnya menjadi solusi kecil yang dapat membesar dan memudahkan terbukanya jalan perubahan. Bila rakyat semakin cerdas, kritis, dan aktif tidak ada pilihan bagi media manapun sebagai instrumen aspirasi untuk tidak berubah. Karena pada fase ini rakyat bukan lagi sekedar sebagai masyarakat tetapi warga negara yang memahami utuh hak dan kewajibannya.

Penutup

Parpol memiliki tanggung jawab besar menghadirkan kandidat-kandidat berkualitas, karenanya parpol harus kuat dan berfungsi penuh di samping para kandidat itu. Terlebih lagi kandidat yang merupakan kader partai dan bukan dari struktur partai. Dalam kerangka itulah, parpol yang berkonflik perlu berkaca diri dan berikhtiar untuk kembali bersatu. Syaratnya, para elite bersedia menurunkan ego politik masing-masing sehingga tercipta sinergi politik yang lebih kuat. Pilkada bukan saja berpengaruh bagi masa depan sebuah parpol melainkan juga kepemimpinan lokal di masa depan. Sekaligus ajang pembuktian sejauh mana parpol-parpol eksis dan berperan melahirkan kepemimpinan lokal. Yang tak mampu menata diri dan mengajukan kandidat terbaiknya, akan kehilangan momentum. Untuk itu, pilkada serentak 2015 inilah sebagai momentum harus diikhtiarakan oleh semua parpol pada tiap tingkatan.

Angga Natalia: **PERAN PARTAI POLITIK DALAM**

Munculnya permasalahan kandidat tunggal pada proses pilkada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa partai politik belum benar-benar serius menjalankan fungsinya terutama untuk melahirkan calon-calon pemimpin muda yang kompeten dan mampu *survive* dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini disebabkan oleh mundurnya pengawalan kaderisasi di partai politik sehingga partai-partai lebih banyak mengandalkan kader-kader pragmatis untuk mempercepat *image building* dan perolehan suara di *grass root*. Hal ini akhirnya, menenggelamkan mental calon-calon pemimpin muda yang sebenarnya memiliki kompetensi yang baik tapi kurang mendapat dukungan dari partai politik.

Daftar Pustaka

- Agung Baskoro, <https://smartgeneration.wordpress.com>, diakses 10 Agustus 2015.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Garamedia, 1985.
- Cholisin, dkk. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Disorientasi Partai Politik Dan Libido Kekuasaan diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai-politik-dan-libido-kekuasaan/>, pada tanggal 10 Agustus 2015.
- Friedrich, Carl J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham . Mass: Blaisdell Publishing Company.
- <http://m.monitorday.com/>, diakses 10 Agustus 2015.
- <http://news.liputan6.com/>, diakses 10 Agustus 2015.
- <http://sp.beritasatu.com/nasional/kenapa-parpol-dan-kandidat-kepala-daerah-takut-pada-petahana>, diakses 10 Agustus 2015.
- <http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009-transparency-international/>, diakses 10 Agustus 2015.
- <http://trimuerisandes.blogspot.com/>, diakses 10 Agustus 2015.

Angga Natalia: **PERAN PARTAI POLITIK DALAM...**

- Imawan, Riswanda, *Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Neumann, Sigmund, “*Modern Political Parties*” dalam *Comparative Politics: A Reader*. Edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. London: The free Press of Glencoe, 1963.
- Rudy, T May, *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2003.
- Soltau, Roger H, *An Introduction to Politics*, London: Longsmans, Green & Co, 1961.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.